

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN PENGENDALIAN PENYAKIT VIRUS CORONA KECAMATAN BANTURUNG KABUPATEN BUKIT BATU

¹Muhamad Yusuf

¹Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

¹m.yusuf@umpr.ac.id

ABSTRACT

Collaborative governance with various parties has become crucial in disaster management. Research into cooperation between non-governmental and governmental entities is becoming crucial to work at this time, when the state is the only single actor capable of carrying out everything is beginning to lose its relevance, so the role of the state must be minimized and must be cut off by the private sector. This research aims to know clearly about *Collaborative Governance* in the control of coronavirus disease (COVID-19) district Banturung, Bukit Batu district, Palangkaraya City, Province Kalimantan Center. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach and a library search, which is a series of related activities using the Library data collection method. The focus of research was taken using Ansell and Gash in the collaborative governance process, starting with face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding and temporary results. (intermediate outcome). The research results showed that the collaborative governance process in combating the control of coronavirus disease (COVID-19) goes well through the process of face-to-face dialogue, negotiations carried out well between stakeholders resulted in various activities to combat the spread of control of covid-19. Activities include arrangement, sharing masks, sharing help, and socialization related to Covid-19. The communication process in the collaborative activities of the treatment of the control of covid-19 is carried out with close coordination to carry out the prevention activities, there is socialization, either directly or indirectly.

Keywords; Collaborative governance; Disease suppression; covid-19

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji tentang *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bukit Batu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan para pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri guna memberikan sosialisasi terkait penanggulangan pengendalian Covid-19. Pasca ditemukannya postif Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, pemerintah pusat melalui kebijakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun

2020 telah menetapkan *Covid-19* sebagai bencana non-alam nasional. Untuk merespons Keppres tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberlakukan masa tanggap darurat *Covid-19* selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 (Nugraheny, 2020).

Bencana pandemi *Covid-19* berakibat banyak sekali bagi organisasi, baik di kalangan pemerintah serta swasta dimohon supaya berperan serta pada penanggulangan wabah pandemi *Covid-19*. Salah satu dari banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju bertambahnya korban jiwa ialah menyiapkan penanganan (Abdusshomad, 2020). Indonesia merupakan termasuk kedalam salah satu dari banyak negara yang merasakan keresahan akibat adanya penularan *Covid-19*. Banyak pihak yang dinilai tidak memahami dalam menangani virus *Covid-19* lantaran *Covid-19* adalah virus jenis baru (Telaumbanua, 2020).

Berdasarkan keterbatasan itulah maka pemerintah membutuhkan adanya kerja sama dengan berbagai pihak. Kolaborasi ialah kerjasama yang mengajak berbagai pihak dalam menanggulangi bencana. Lemahnya koordinasi antara pemerintah dan para pihak terkait lainnya adalah penyebab adanya banyak sekali hambatan yang dialami pada penanggulangan wabah di Indonesia. *Collaborative* adalah tanggapan atas pergeseran-pergeseran juga perubahan-perubahan lingkungan atas sebuah kebijakan. Perubahan bisa terjadi pada bentuk jumlah pelaku kebijakan, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi karena kapasitas pemerintah yang sangat terbatas (Agustina, 2018).

Konsep kolaborasi ialah kerjasama antar pihak intensif, termasuk usaha membuat penyesuaian sadar dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya kekuatan dan tindakan. Di mana fasilitas itu berada pada dasarnya, tetapkan tujuan dan mncoba menjadikan itu kenyataan (Bonso & Irwan, 2021).

Collaborative ialah salah satu unsur pada manajemen serta perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang juga secara konstruktif dari berbagai level, baik pada jajaran pemerintahan juga instansi publik, pihak swasta maupun warga sipil pada rangka mencapai tujuan publik. Menurut (Ansell & Gash, 2008) menyebutkan bahwa kerja sama pada pemerintahan ialah peraturan yang mengatur salah satu atau lebih forum publik yang menggunakan pemangku kepentingan non publik pada proses pengambilan keputusan yang bersifat formal,

berorientasi konsensus, serta musyawarah yang memiliki tujuan agar menciptakan atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola acara atau aset publik. Kolaborasi ialah upaya pemerintah bekerjasama dengan rakyat yang peduli kemudian menjadi individu dan partisipasi kelompok yang terorganisir (Bonso & Irwan, 2021). Pendekatan pemerintahan kolaboratif akan membuat sistem kelembagaan mampu mendorong partisipasi masyarakat, serta dapat membangun sistem akuntabilitas untuk mengelola program berbasis masyarakat (Kurniasih et al., 2017).

Berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peran kerja sama dalam penanggulangan bencana. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Majid et al., 2021) dimana membahas bagaimana hubungan terjalin atau kerjasama antar administrasi dalam penanganan *Covid-19* di Malang. Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan jika pada saat menghadapi bencana *Covid-19*, pemerintah daerah Malang sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama yang terjalin bersama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk perang yang lebih efektif melawan *Covid-19*. Melalui kerja sama dapat meningkatkan kekuatan pemerintah untuk melakukan penanggulangan *Covid-19* saat kapasitas bantuan meningkat masing-masing pemangku kepentingan tersebut (Machruf et al., 2020).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Bustari et al., 2018) juga menyatakan jika pemerintah harus bersinergi yang baik dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan independen dalam menangani bencana. Penelitian oleh (Suarjat, 2017) menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi yang baik suatu kondisi yang dapat mempengaruhi peran dan bentuk sinergi yang dilakukan secara berurutan. Meningkatkan manajemen bencana. Persepsi ini juga dikonfirmasi oleh penelitian (Pratikno & Kurniadi, 2021) yang menunjukkan adanya kerjasama yang baik akan menjadi sangat penting dalam mempengaruhi hasil dan upaya penanggulangan bencana itu sendiri. Penanggulangan bencana memang perlu dilakukan dengan memperhatikan kendala-kendala waktu, sumber daya, dan anggaran pemerintah. Penanggulangan bencana juga perlu dikaji ulang untuk melihat seperti apa model kolaborasinya (Alfitra Perdana et al., 2021). Sedangkan pada penelitian (Martomo et al., 2019) terkait *collaborative governance* dimulai dari proses kerja sama dimulai dengan pembentukan aparat internal; setelah itu, masyarakat sipil dan sektor swasta dibentuk. Dengan memberikan kontribusi keterampilan manajemen dan keuangan,

penguatan sektor swasta meringankan beban. Dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan, pemerintah kota mendapatkan dukungan dari sektor swasta dan publik. Selama situasi darurat, instruksi birokrasi telah terbukti menjadi strategi yang efektif. Administrasi kolaboratif yang didasarkan pada instruksi birokrasi dari sudut pandang pemerintah (yaitu, *i. e. empowerment*, kepemimpinan, dan *empowerment*) telah terbukti mempercepat pemulihan. Pada akhirnya, dalam situasi pasca-keadaan darurat, pendekatan kemitraan *multi-stakeholder* (MSP) berhasil.

Untuk mencapai orientasi nilai yang akan dicapai, proses *collaborative governance* yaitu model atau pendekatan yang mencoba menggambarkan kondisi masalah yang dapat diselesaikan melalui kerja sama atau sinergi antara berbagai pihak (Saputra & Kurniasih, 2023).

Berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *collaborative governance* dalam penanggulangan pengendalian penyakit virus corona Kecamatan Banturung Kabupaten Bukit Batu.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang *collaborative governance* dalam penanganan *Covid-19*. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka/ library research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber data primer yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang *collaborative governance*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (Covid-19).

Ansell dan Gash menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program terletak dalam proses *collaborative governance* karena didalamnya terdapat komunikasi yang merupakan inti dari *collaborative governance*. Proses *collaborative governance* diawali tahap Dialog Tatap Muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcome*).

Dialog Tatap Muka (*face to face*)

Komunikasi merupakan jantung kegiatan kolaborasi, yang dimulai dengan tahap dialog tatap muka. Tatap muka kolaboratif semua didasarkan pada dialog antara para pemangku kepentingan. Dialog tatap muka lebih dari sekedar media berorganisasi. Dialog tatap muka merupakan inti dari proses memecahkan stereotip dan hambatan lain untuk eksplorasi perolehan bersama di tempat pertama. Dialog tatap muka merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk proses kolaborasi secara keseluruhan. Dalam komunikasi stakeholders menciptakan persamaan pengertian, ide, pemikiran dan sikap tingkah laku.

Pada penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (*Covid-19*), dialog tatap muka atau dengan kata lain rapat merupakan suatu media yang digunakan untuk berkoordinasi antara pihak satu dengan yang lain. Pemanfaatan dialog tatap muka sebagai sarana yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang bersifat formal. Forum deliberatif diketahui telah diupayakan dari awal perencanaan proses kolaborasi. Semua stakeholders ikut terlibat di dalam proses komunikasi dan negosiasi melalui pertemuan-pertemuan formal yang bersifat insidental.

Berdasarkan hasil penelitian, dialog tatap muka yang dilakukan para stakeholders rutin dijalankan. Dialog tatap muka yang diadakan masih menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (*Covid-19*).

Berdasarkan hasil penelitian oleh berbagai informan di atas diketahui bahwa pada aspek dialog tatap muka, negosiasi yang dilakukan berjalan dengan baik antar stakeholder, negosiasi tersebut menghasilkan berbagai kegiatan untuk menanggulangi dan mengendalikan penyebaran *Covid-19* di kawasan Bukit Batu, adapun kegiatan yang dimaksud adalah penertiban, pembagian masker, pembagian

bantuan sembako, dan sosialisasi terkait *Covid-19*. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan para stakeholder di antaranya Kecamatan Banturung, Koramil/Polsek, Puskesmas, LSM dan relawan masyarakat.

Membangun Kepercayaan

Proses *collaborative governance* membutuhkan adanya rasa saling percaya antar stakeholders, sehingga proses membangun kepercayaan diantara stakeholders menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Membangun kepercayaan dapat dilihat dari proses komunikasi. Upaya membangun kepercayaan sangat dibutuhkan dalam menciptakan *collaborative*. Hal tersebut dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat di dalam proses penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (*Covid-19*), yang dilakukan pemerintah. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sangatlah penting dalam suatu kehidupan berorganisasi, bahkan menjadi tuntutan. Komunikasi dalam organisasi menjadi titik sentral dalam menciptakan situasi dan lingkungan yang kondusif, menjalin komunikasi berkesinambungan, meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan citra baik.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses komunikasi untuk membangun kepercayaan dengan kegiatan kolaborasi penanganan pengendalian *Covid-19* dilakukan dengan rapat koordinasi untuk menjalankan kegiatan penanggulangan, lalu terdapat sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, pemantauan dan pengawasan kesehatan masyarakat, dan pemberian instruksi untuk mendata dan melaporkan warga yang sakit. Berbagai kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh para stakeholder dalam membangun kepercayaan masyarakat bahwa penanggulangan pengendalian *Covid-19* ini dapat dilakukan bersama-sama.

Komitmen dalam Proses

Komitmen berkaitan erat dengan seluruh aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu, 1. pengakuan bersama, 2. Apresiasi bersama, 3. Kepercayaan antar lini, dan rasa memiliki dalam proses. Analisa pembentukan sebuah komitmen pada setiap lini dalam kolaborasi dapat dilihat pada tujuan kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebuah komitmen dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat berjalan sangat baik terlihat dari kesiapan, kepedulian, dan ketersediaan tanpa paksaan dalam kolaborasi melaksanakan instruksi

dan program penanggulangan *Covid-19* dari berbagai informasi oleh para informan, kerjasama yang terjalin dapat dikatakan berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan penanggulangan pengendalian *Covid-19* berhasil dilakukan. Para stakeholder juga mengungkapkan selama kegiatan berlangsung, kendala dalam jalinan kerjasama tersebut bisa dikatakan tidak ada, kendala yang terjadi justru berasal dari luar hal tersebut, sehingga dengan berhasilnya kerjasama yang terjalin kepercayaan terhadap antar stakeholder tercipta.

Dari poin komitmen terhadap proses *collaborative governance* pada Kecamatan Banturung dalam penanganan dan pencegahan *Covid-19* dapat peneliti simpulkan komitmen antar lini dari pemerintahan, Koramil, Polsek, Puskesmas, LSM, dan Relawan Masyarakat terlaksana dengan baik dengan tercerminnya kekompakan, dan kepercayaan serta kerjasama yang baik tanpa ada paksaan dengan menjalankan program dari Walikota.

Berbagi Pemahaman (shared understanding)

Beberapa titik dalam *collaborative*, para pemangku kepentingan mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang mereka yakini agar dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagi pemahaman bersama dalam berbagai literatur dianggap sebagai misi, landasan dan tujuan, berbagi visi, tujuan yang jelas atau keselarasan nilai-nilai. Pemahaman bersama terhadap proses *collaborative* dalam penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (*Covid-19*) berimplikasi pada manfaat dan keuntungan *collaborative*.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman bersama *collaborative governance* dalam penanganan *Covid-19* di Kecamatan Banturung dapat disimpulkan bahwa musyawarah dilakukan oleh masing-masing stakeholder agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Musyawarah adalah cara yang dilakukan untuk menyatukan pendapat serta pemikiran para stakeholder. Musyawarah tersebut dilakukan pada saat rapat koordinasi kegiatan/program, dengan musyawarah maka diperoleh kesepakatan bersama baik mengenai tujuan, sasaran, pembagian peran/jobdesk, anggaran, dan sebagainya. Dalam menyelesaikan jobdesk yang diberikan diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing rapat koordinasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan

rencana yang telah disusun dapat terimplementasikan pada saat terjun langsung saat program dijalankan.

Hasil Sementara

Hasil sementara ini mewakili output nyata dalam setiap pemangku kepentingan. Keberhasilan kecil dapat memberi makna pada proses kolaboratif, mendorong siklus positif dari membangun kepercayaan dan komitmen untuk dapat melihat hasil sementara tersebut dapat dilihat dari kepuasan dan rencana strategis.

Pencapaian Tujuan

Pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan pengendalian virus *Covid-19* ini telah mencapai hasil yang diharapkan oleh para stakeholder diantaranya:

1. Kegiatan kolaborasi yang telah disusun sebaik-baiknya dapat berjalan dengan lancar;
2. Komunikasi, kerjasama dan kepercayaan yang terjalin dapat dipertahankan demi kelangsungan kegiatan/program penanggulangan *Covid-19*;
3. Penyebaran virus *Covid-19* di wilayah Banturung dapat secara bertahap berkurang dan dapat segera teratasi.

Hasil sementara yang telah disebutkan di atas sejauh kegiatan penanggulangan ini dijalankan, hampir sepenuhnya tercapai. Berbagai upaya akan terus dikerahkan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* ini, khususnya di wilayah Kecamatan Banturung. Hasil sementara yang diperoleh dalam kegiatan kolaborasi ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari segala lini mulai dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

Rencana Strategis

Strategi merupakan salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dalam proses *collaborative*. Strategi adalah cara untuk mencapai sasaran jangka panjang. (Hatten & Hatten, 1987) salah satu strategi yang efektif hendaknya menjelaskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lainnya. Persaingan tidak sehat antara beberapa unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkan unit kerja terpisah dari unit lainnya sehingga kekuatan yang tidak menyatu itu merugikan posisi organisasi.

Terkait penanganan pencegahan penyebaran wabah corona virus disease 19 (*Covid-19*) di kecamatan Banturung menyusun dan menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi *Covid-19* seperti: 1. Penanganan Kedaruratan Kesehatan 2. Jaring Pengaman Sosial 3. Ketahanan Ekonomi 4. Pranata Sosial Baru untuk Mencegah Konflik Sosial.

Hambatan yang Dihadapi dalam penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (*Covid-19*)

Pelaksanaan penanggulangan pengendalian penyakit Virus Corona (*Covid-19*) dilakukan karena ada faktor-faktor yang mendukung. Hal ini menarik karena dengan adanya penghambat dan muncul dengan cepat maka trial and error terjadi sehingga pemerintah dengan cepat mencari solusi terbaik dalam proses percepatan penanggulangan *Covid-19* di Banturung agar berjalan lebih baik dari hari sebelumnya. Berbagai informan di atas menyampaikan bahwa faktor utama yang menghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan yang telah diinstruksikan.

D. SIMPULAN

Penanganan pandemi *Covid-19* di Kecamatan Banturung dalam melakukan *collaborative governance* dengan membangun posko satgas pada beberapa titik di dusun dimana dilibatkannya beberapa masyarakat dari dusun tersebut, bersama pemerintah dan peran masyarakat sekitar percepatan penanggulangan dapat berjalan efektif.

Pada aspek dialog tatap muka (*face to face*), berbagai kegiatan penanggulangan tersebut merupakan media negosiasi yang dilakukan oleh para stakeholder yang saling berkolaborasi untuk memberikan perannya sebaik mungkin agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa aspek dialog tatap muka, negosiasi yang dilakukan berjalan dengan baik antar stakeholder, negosiasi tersebut menghasilkan berbagai kegiatan untuk menanggulangi dan mengendalikan penyebaran *Covid-19* di kawasan Banturung, adapun kegiatan yang dimaksud adalah penertiban, pembagian masker, pembagian bantuan sembako, dan sosialisasi terkait *Covid-19*.

Pada aspek membangun kepercayaan (*trust building*), proses komunikasi sebagai sub aspek kajian berjalan dengan lancar. Komunikasi dilakukan baik secara langsung

ataupun tidak langsung dalam melakukan koordinasi untuk menjalankan kegiatan. Dengan komunikasi yang baik, maka para stakeholder dapat memahami secara menyeluruh mengenai peran yang harus dilakukan dalam kegiatan dengan satu sama lain. Umumnya komunikasi dilakukan melalui daring (*online*) yakni menggunakan grup ataupun platform digital seperti Zoom meeting atau Google meet, namun untuk beberapa stakeholder seperti petugas Puskesmas dan relawan masyarakat komunikasi secara langsung lebih sering dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi untuk membangun kepercayaan dengan kegiatan kolaborasi penanganan pengendalian *Covid-19* dilakukan dengan rapat koordinasi untuk menjalankan kegiatan penanggulangan, lalu terdapat sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, pemantauan dan pengawasan kesehatan masyarakat, dan pemberian instruksi untuk mendata dan melaporkan warga yang sakit. Berbagai kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh para stakeholder dalam membangun kepercayaan masyarakat bahwa penanggulangan pengendalian *Covid-19* ini dapat dilakukan bersama-sama.

Aspek komitmen pada proses (*commitment to process*) pada penelitian ini menunjukkan bahwa para stakeholder memiliki komitmen bersama yang kuat untuk menjalankan masing-masing perannya agar tujuan program ini tercapai. Kerjasama yang tercipta dari komitmen ini berjalan dengan lancar sehingga para stakeholder memiliki kepercayaan satu sama lain.

Pada aspek berbagi pemahaman (*shared understanding*) para stakeholder melakukan musyawarah dalam rapat koordinasi untuk menyampaikan dan menyatukan pendapatnya. Dalam proses musyawarah tujuan, sasaran, anggaran, dan proses rangkaian kegiatan dapat disepakati dan dipahami bersama. Berdasarkan dari poin komitmen terhadap proses *collaborative governance* dapat disimpulkan pada Kecamatan Banturung dalam penanganan dan pencegahan *Covid-19* dapat peneliti simpulkan komitmen antar lini dari pemerintahan, Koramil, Polsek, Puskesmas, LSM, dan Relawan Masyarakat terlaksana dengan baik dengan tercerminnya kekompakan, dan kepercayaan serta kerjasama yang baik tanpa ada paksaan dengan menjalankan program dari Walikota.

Pada aspek kajian terakhir, yakni hasil sementara, para stakeholder memiliki beberapa hal yang diharapkan yakni : 1) Kegiatan kolaborasi yang telah disusun

sebaik-baiknya dapat berjalan dengan lancar; 2) Komunikasi, kerjasama dan kepercayaan yang terjalin dapat dipertahankan demi kelangsungan kegiatan/program penanggulangan *Covid-19*; dan 3) Penyebaran virus *Covid-19* di wilayah Banturung dapat secara bertahap berkurang dan dapat segera teratasi. Berbagai keberhasilan kecil yang diharapkan tersebut tentunya memiliki faktor pendukung, pada proses kolaborasi ini selain dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang serius, ketersediaan fasilitas yang memadai turut membantu keberhasilan program.

Selain terdapat faktor pendukung dalam setiap keberhasilan kegiatan, terkadang terdapat faktor penghambat, pada proses kolaborasi ini yang menjadi faktor penghambat adalah beberapa masyarakat yang masih kurang peduli dengan masyarakat lainnya, kurangnya kesadaran mengenai protokol kesehatan yang ditetapkan dan kurang tertibnya dalam melakukan kegiatan keseharian seperti yang sudah dihimbau menjadikan proses penanggulangan ini menjadi terhambat. Kondisi ini juga beberapa dikarenakan faktor pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara jarak jauh (remote), sehingga hal ini menjadi sebuah kendala dalam menjalankan program percepatan penanggulangan *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Penerapan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.407>
- Agustina, D. (2018). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9, 87–103. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.87>
- Alfitra Perdana, V., Syafiqurrohman, A., Noor Cahyadi Eko Saputro, M., Aribah Hanif, N., Miftahul Ahsan, M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 252–269. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11743>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bonso, H., & Irwan, I. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(2 SE-Articles). <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/pdf>
- Bustari, A., Trisnantoro, L., & Hasanbasri, M. (2018). Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*, 1(1 SE-Articles), 42–63. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/371>
- Hatten, K. J., & Hatten, M. L. (1987). Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contestability. *Strategic Management Journal*, 8(4), 329–342. <https://doi.org/10.1002/smj.4250080404>
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Collaborative Governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7.
- Machruf, I., Hermawan, D., & Fitri Meutia, I. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2, 129–146. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Majid, A. I., Muchin, S., & Sunariyanto. (2021). Interelation Institusional Collaboration Dalam Penanggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*.
- Martomo, Y. P., Suwitri, S., & Setyoko, P. I. (2019). Collaborative Governance Based Post-Fire Pasar Klewer Management From Goverment Sector Perspective. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 6, 74–87.
- Nugraheny, D. E. (2020). Masa Darurat Bencana akibat Virus Corona Diperpanjang hingga 29 Mei. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-mei>
- Pratikno, H., & Kurniadi, A. (2021). Kolaboratif Pengelolaan Candi Borobudur dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. *Edukasi IPS*, 5(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.21009/EIPS.005.1.01>

- Suarjat, J. (2017). Evaluation the Effectiveness of Disaster Rapid Response Unit in Western Area of Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 8(1), 80–100.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12, 59–70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>